

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa “Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah dalam rangka pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. Kemajuan teknologi telah membuka kemungkinan untuk menggunakan Sistem Informasi Akuntansi dari sudut pandang yang strategis. Keberadaan teknologi informasi dapat mempermudah pemerintah daerah dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam menyiapkan informasi akuntansi terkait penyusunan RAPBD, maka dalam kondisi saat ini begitu sangat diperlukan adanya suatu sistem yang dapat membantunya, dimana salah satunya menerapkan Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Dijelaskan dalam hal ini bahwa SIA merupakan sistem yang dijalankan dengan adanya keterlibatan yang memiliki peran yang sangat penting yakni diperkukan adanya sumber daya seperti manusia, dan teknologi dan juga sistem ini selanjutnya dirancang untuk membantu dan menunjang pihak lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang secara baik dan benar di dalam hal membuat laporan eksternal, dimana juga sekaligus mampu membantu dan mendukung aktivitas rutin

dijalankan secara terstruktur, mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat, perencanaan, serta juga dapat menjadi sarana pendukung dalam pengendalian internal. Dengan demikian, maka dijelaskan bahwa SIA ialah suatu sistem yang pada saat digunakan akan melakukan serangkaian proses dimulai dari mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi para pihak pengambilan keputusan.

Fungsi yang esensial atau dianggap penting akan dibentuknya SIA bagi institusi yakni membantu dalam mengumpulkan serta menyimpan data yang ada hubungan atau kaitannya tentang aktivitas dan juga serangkaian transaksi, dimana juga akan memproses data menjadi informasi yang dapat dipakai di dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan dapat diambil secara lebih tepat. Untuk membangun sistem informasi yang akurat, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Terkait prosedur pengelolaan keuangan daerah, SIPD merupakan sistem informasi berbasis web yang membagi dalam beberapa rangkaian prosedur yang berurutan dan terintegrasi dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

SIPD wajib diimplementasikan pemerintah daerah sejak tahun 2020 dalam tata kelola keuangan dan pembangunan termasuk yaitu dimulai dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan informasi keuangan dan pembangunan daerah disajikan dalam suatu sistem pemerintah daerah. Meskipun implementasi SIPD memudahkan dalam

mengelola data pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan lainnya. Namun, implementasinya pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan masih belum sepenuhnya optimal.

Berbagai kendala teknis dan non-teknis kerap menjadi hambatan dalam implementasinya. Permasalahan ini terungkap dalam pertemuan “*exit meeting*” antara Bupati Tabanan dan Tim Pemeriksa Badan Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada 31 Maret 2023 dalam rangka mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan SIPD berbasis elektronik di Kabupaten Tabanan, terutama dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah. Salah satu yang diangkat oleh BPK dalam pertemuan tersebut yakni tentang perubahan yang terjadi setiap minggu pada aplikasi tersebut, kondisi ini membutuhkan sosialisasi yang baik agar tidak terjadi kebingungan di kalangan pengguna.

Meskipun aplikasi SIPD sudah dirancang dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan kesediaan Sumber Daya Manusia di pemerintah daerah dalam mengadaptasi sistem informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek teknis, manajemen perubahan dan pelatihan penggunaan juga sangat penting dalam proses implementasi. Ketersediaan data yang akurat dan dapat dipercaya sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan SIPD bertujuan untuk memperbaiki kualitas data tersebut. Namun, jika pengguna tidak memahami cara kerja sistem atau tidak diberikan pelatihan yang memadai, data yang dihasilkan tidak akan optimal (Mohar Syarif, 2023). Pengembangan sistem ini tidak bisa hanya mengandalkan bagaimana dikembangkan oleh pusat, tetapi harus disambut dengan

baik oleh penggunaanya. Pemerintah daerah perlu merancang manajemen perubahan selain substansi sistemnya.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan kepada Bapak I Made Kartika selaku pegawai di bidang Akuntansi mengenai SIPD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menyatakan pada tahap awal implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis aplikasi SIPD di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, ditemukan sejumlah kendala teknis dan operasional. Dari tahun 2023 hingga 2025 menghadapi beberapa hambatan, seperti kesulitan teknis dalam pengoperasian sistem, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman terhadap fitur – fitur dalam aplikasi SIPD.

Hingga saat ini, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan telah sepenuhnya menggunakan SIPD. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala, khususnya dalam hal format penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam proses koordinasi yang lumayan lama mendapatkan solusi dari pemerintah pusat terkait permasalahan SIPD yang dihadapi. Untuk permasalahan yang kompleks, memerlukan waktu antara dua minggu hingga satu bulan, untuk mendapatkan respons atau solusi dari pemerintah pusat, sementara untuk permasalahan yang lebih ringan dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga hari kerja.

Meningkatnya penggunaan sistem informasi telah membantu mengotomatisasi pemrosesan data yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi otomatis. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan hasil kerja

para pegawai organisasi. Ketika menggunakan sistem informasi, operator organisasi yang menggunakan teknologi informasi harus memperhatikan bagaimana keberhasilan sistem berdampak positif terhadap peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi secara keseluruhan. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi SIPD dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas telah banyak dikaji peneliti – peneliti sebelumnya. Salah satu faktor yang dapat menghambat implementasi SIPD adalah Kompetensi SDM.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pihak yang memiliki peran dan pengaruh paling tinggi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu instansi atau organisasi, dikarenakan SDM sebagai salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah instansi pemerintah (Pasek & Pasek, 2023). Penelitian yang mengkaji pengaruh SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh (Fitriasari, 2024; Yulianda, dkk. 2022; Siregar, dkk. 2024; Gunawan & Sujana, 2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian (Philadelphia, dkk. 2020), menyatakan bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak I Made Kartika, SDM sebagai pengguna sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis elektronik yaitu SIPD. SDM yang dibutuhkan oleh Badan Keuangan Daerah Tabanan adalah pegawai yang memiliki jika profesionalisme, memiliki kompetensi yang memadai dan pengalaman kerja. Pernyataan ini didukung oleh

penelitian Basar Wirawan (2016) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan melalui penggunaan SIA pada SIPD. Kompetensi SDM mencakup kemampuan teknis, pemahaman terhadap sistem, keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi, dan kesiapan dalam menghadapi perubahan teknologi. Sumber daya manusia yang memiliki pemahaman akuntansi tentunya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan (Dwiyanti & Werastuti, 2024).

Bapak I Made Kartika, menyatakan bahwa implementasi SIPD melibatkan pegawai dari berbagai bidang seperti Penganggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Aset pada Badan Keuangan Daerah Tabanan. *Input* data dilakukan sesuai dengan fungsi setiap bidang. Tidak semua pegawai memiliki kewenangan untuk menyusun laporan keuangan, dikarenakan kewenangan tersebut dibagi secara hierarkis dan berdasarkan tugas setiap bidangnya. Akses pegawai ke dalam sistem SIPD harus menggunakan *username* dan kata sandi (*password*) yang telah disesuaikan dengan tingkat kewenangan setiap pegawai. Khusus untuk bidang akuntansi memiliki akses penuh pada SIPD melalui akun Badan Umum Daerah (BUD), yang hanya dapat digunakan oleh pegawai tertentu di Badan Keuangan Daerah.

Hal ini menunjukkan adanya pembatasan akses yang ketat guna menjaga keamanan dan integritas data keuangan daerah. Dalam praktiknya, pegawai Badan Keuangan Daerah Tabanan menggunakan perangkat kerja yang beragam, baik menggunakan laptop pribadi maupun komputer kantor. Penelitian Paranoan et al. (2019), menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, SDM (staf) harus memiliki

keseimbangan yang baik, baik dalam hal kualitas maupun jumlah. SDM memegang peranan penting dalam menjalankan implementasi kebijakan, sehingga program dapat dijalankan implementasi kebijakan, sehingga program dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Asmawati, dkk. (2024), yang menyatakan bahwa peningkatan SDM staf penting dilakukan sebagai upaya dalam implementasi SIPD. Hal ini sejalan dengan Mariana & Pandoyo (2024), Vitriana, dkk. (2022) dan Dione & Faradina (2020) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kurangnya pemahaman dan kompetensi pengguna (SDM) terkait penggunaan aplikasi SIPD menjadi kendala utama dalam implementasi SIPD, sehingga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi implementasi SIPD yang optimal juga sangat ditentukan oleh seberapa baik komunikasi dan koordinasi pada setiap organisasi daerah yang mencakup penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya OPD di Kabupaten Tabanan dengan Tim Pusat pengelola SIPD, sangat penting untuk memastikan penggunaan SIPD secara optimal. Sehingga, dapat memberikan kontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan efisien dalam pengelolaan data keuangan secara terstruktur dan meningkatkan administrasi.

Menurut Septiani & Isnawaty (2024), komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dan pemerintah pusat sebagai

pembuat kebijakan sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Adanya informasi dan komunikasi membantu identifikasi, pengumpulan, dan pertukaran informasi dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan agar terpenuhinya suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, minimnya komunikasi dan koordinasi dapat menghambat terlaksananya implementasi SIPD. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vitriana, dkk. (2022), menyatakan bahwa komunikasi belum secara optimal berjalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum efektif sehingga mempengaruhi implementasi SIPD.

Dari hasil wawancara dengan Bapak I Made Kartika selaku pegawai di bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Tabanan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah, belum terdapat mekanisme pengawasan internal yang signifikan di masing-masing bidang. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dan pengembangan SIPD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Tabanan tidak memiliki akses untuk melakukan perbaikan langsung dalam sistem. Oleh karena itu, seluruh proses koreksi dan segala bentuk perbaikan harus menunggu respons dari tim teknis di pusat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lemahnya kendali internal karena tidak adanya kewenangan dari pemerintah daerah terutama Badan Keuangan Daerah Tabanan.

Dengan demikian, pengawasan yang lemah akan memperbesar potensi kesalahan dan keterlambatan dalam pelaporan. Hasil penelitian terkait respons pemerintah pusat yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat dianggap kurang cepat dalam menangani keluhan teknis terkait SIPD ditemukan oleh Mariana &

Pandoyo (2024) dan Rezkiaty, dkk. (2024). Selain itu, hasil penelitian dari Adisi & Sadad (2022) dan Putri, dkk. (2020), mengungkapkan bahwa tindak lanjut terhadap laporan kendala teknis dari pemerintah daerah masih sering ditunda oleh pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Rumondor, dkk. (2023) juga mengungkapkan bahwa implementasi aplikasi sistem informasi berbasis web secara terpusat menjadi kewajiban pemerintah pusat yang harus selalu siap untuk berkomunikasi dan memberikan tanggapan atau arahan yang jelas, akurat, dan konsisten kepada entitas – entitas di pemerintah daerah yang menjadi pengguna aplikasi sistem informasi. Hal tersebut penting untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan implementasi aplikasi sistem informasi dengan baik, sehingga penggunaan SIPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor ketiga yang diduga memiliki pengaruh terhadap SIPD adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah, dikeluarkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan sistem seperti SIPD. Dimaksudkan bahwa penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 serta memenuhi prinsip yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut. Pemerintah daerah

diharuskan untuk menerapkan SAP secara optimal, terutama dalam penggunaan aplikasi SIPD terkait pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak I Made Kartika selaku pegawai di bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Tabanan terkait SIPD telah dirancang dan diimplementasikan berdasarkan ketentuan SAP yang berlaku. SIPD telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip – prinsip SAP, yang menjadi indikator pendukung keberhasilan dalam menyajikan laporan keuangan yang andal dan terstandar. Hal ini membuktikan bahwa secara normatif, sistem SIPD sudah mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun secara implementasi masih memerlukan perbaikan teknis dan peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah. Penelitian yang meneliti pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik dilakukan oleh (Winarni, dkk. 2020; Asdi & Munari, 2023; Irmawati Hamruna, dkk. 2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas publik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendala dalam implementasi SIPD bersifat kompleks, namun sebagian besar studi masih berfokus pada satu atau dua aspek saja, tanpa mengintegrasikan ketiga variabel penting yang memengaruhi implementasi sistem informasi ini secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*), karena berupaya mengkaji secara simultan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Implementasi SIPD Kabupaten Tabanan. Pemilihan ketiga variabel tersebut didasarkan pada kepentingan Sumber Daya Manusia sebagai pengguna utama

sistem informasi pemerintah daerah, efektivitas pengendalian internal dalam menjaga kualitas proses dan data, serta penerapan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan peraturan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi dalam menyebarluaskan pengetahuan terkait sistem informasi khususnya SIPD pada pemerintahan daerah. Fenomena mengenai Hambatan Penggunaan SIPD menjadi hal yang menarik untuk diketahui faktor yang dapat mempengaruhinya. Urgensi dari penelitian ini didasarkan pada upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD yang lebih optimal. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana pengaruh Kompetensi SDM, SPIP, dan SAP Terhadap SIPD dalam pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. Dikarenakan hubungan antara Kompetensi SDM, SPIP, dan SAP sangat penting karena dalam suatu instansi atau lembaga membutuhkan ketiganya untuk menjalankan tugas instansi melalui implementasi SIPD. Berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan di atas. Maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tabanan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meskipun SIPD telah diterapkan sepenuhnya dalam pelaporan keuangan daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan non teknis, termasuk perubahan sistem yang bersifat dinamis, serta respons

lambat dari pemerintah pusat terkait kendala atau hambatan yang dialami Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

2. Tidak adanya kewenangan teknis bagi pemerintah daerah terutama Badan Keuangan Daerah untuk memperbaiki kesalahan atau kendala yang dihadapi terhadap sistem secara langsung menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal, sehingga koreksi terhadap masalah yang terjadi harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat.
3. Pihak Pemerintah Badan Keuangan Daerah mengalami kesulitan dalam berkomunikasi terkait hambatan atau kendala dengan Tim Pusat yang bertanggungjawab terhadap SIPD. Sehingga, mempengaruhi kecepatan solusi dan efektivitas pemanfaatan sistem karena lambatnya respons pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan dan keluhan terkait kendala SIPD.
4. Meskipun SIPD telah didesain berdasarkan SAP, dalam praktiknya masih diperlukan upaya perbaikan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan benar – benar akurat, dan sesuai standar yang berlaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan, maka diperlukan pembatasan masalah agar pengkajian yang dilakukan lebih berfokus pada permasalahan – permasalahan yang ingin dipecahkan. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel utama yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memengaruhi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Batasan masalah dalam

penelitian ini juga berfokus dengan lokasi penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dipilih karena termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik sering kali mengalami hambatan atau kendala – kendala dalam penggunaannya baik secara teknis maupun non-teknis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap SIPD?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap SIPD?
3. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah terhadap SIPD?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap SIPD?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap SIPD.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap SIPD.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap SIPD.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap SIPD.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumber bahan kajian bagi instansi pemerintah maupun bagi pembaca serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi aplikasi SIPD. Penemuan dan wawasan yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan panduan dan referensi dalam pengembangan teori yang berguna dalam menangani hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan efisien dalam kaitannya dengan Kompetensi SDM, SPIP, dan SAP.

B. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Mampu menambah pengetahuan mahasiswa tentang laporan keuangan daerah terutama dalam penggunaan aplikasi SIPD yang digunakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta informasi dan bacaan yang dapat menambah wawasan tentang bagaimana penggunaan aplikasi SIPD.

3) Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Tabanan tentang hambatan atau kendala yang terjadi dalam penggunaan SIPD serta dalam memberikan informasi bagi pemerintah untuk mengantisipasi adanya hambatan atau kendala yang mungkin terjadi. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau solusi praktis sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem informasi yang efektif dan efisien melalui penguatan Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

